

# INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam

ISSN : 2809-7645

E-ISSN : 2809-7653

DOI :

Vol.6 No. 01, 2026

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/interaksi>



## Framing Demokrasi dan Kekerasan Negara dalam Media Islam Digital: Analisis Robert N. Entman atas Pemberitaan NU Online tentang Demonstrasi DPR 2025

### Keywords

*Media framing, NU Online, Demonstrasi DPR, Media Islam Digital, Islam dan Demokrasi*

### ABSTRACT

This study analyzes the framing of NU Online in its coverage of the August 2025 House of Representatives (DPR) demonstrations using Robert N. Entman's framing analysis model. As a digital media platform affiliated with Nahdlatul Ulama, NU Online occupies a strategic position in shaping public narratives at the intersection of Islamic values and democratic discourse. The research employs a qualitative approach with a constructivist paradigm, examining news texts through four framing dimensions: define problems, diagnose causes, make moral judgments, and treatment recommendation. Findings indicate that NU Online constructed a narrative centered on state repression rather than public order disruption, identified security forces as the primary cause of conflict, positioned the state as morally culpable, and recommended institutional accountability as the principal solution. These findings demonstrate that NU Online's framing reflects a critical-democratic editorial orientation that aligns civilian protection values with Islamic principles of justice (adl) and public interest (masalah). This study contributes to the growing literature on Islamic digital media framing and its role in shaping democratic discourses in plural societies.

### Kata Kunci

*Media framing, NU Online, DPR Demonstration, Digital Islamic Media, Islam and Democracy*

### ABSTRAK

Studi ini menganalisis pembingkaiannya NU Online dalam liputannya tentang demonstrasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agustus 2025 menggunakan model analisis pembingkaiannya Robert N. Entman. Sebagai platform media digital yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU Online menempati posisi strategis dalam membentuk narasi publik di persimpangan nilai-nilai Islam dan wacana demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis, meneliti teks berita melalui empat dimensi pembingkaiannya: mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan rekomendasi penanganan. Temuan menunjukkan bahwa NU Online membangun narasi yang berpusat pada represi negara daripada gangguan ketertiban umum, mengidentifikasi pasukan keamanan sebagai penyebab utama konflik, memosisikan negara sebagai pihak yang bersalah secara moral, dan merekomendasikan akuntabilitas institusional sebagai solusi utama. Temuan ini menunjukkan bahwa pembingkaiannya NU Online mencerminkan orientasi editorial kritis-demokratis yang menyelaraskan nilai-nilai perlindungan sipil dengan prinsip-prinsip keadilan (adl) dan kepentingan umum (masalah) Islam. Studi ini berkontribusi pada

## Pendahuluan

Perkembangan media digital di Indonesia telah menghadirkan aktor-aktor baru dalam ekosistem informasi publik, termasuk media yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan. Salah satu yang menonjol adalah NU Online, platform pemberitaan digital Nahdlatul Ulama yang tidak hanya berfungsi sebagai media dakwah, tetapi juga semakin aktif dalam pemberitaan isu-isu sosial-politik nasional. Posisi strategis NU Online menjadi semakin signifikan ketika dihadapkan pada peristiwa-peristiwa politik berskala besar, termasuk demonstrasi massa yang merespons kebijakan DPR pada Agustus 2025. Kehadiran media berbasis ormas Islam dalam diskursus politik Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari konteks meningkatnya mobilisasi berbasis identitas keagamaan dalam ruang publik digital, sebagaimana ditunjukkan oleh studi mengenai media sosial dalam gerakan 212 (Syahputra, 2020) serta dinamika komunikasi pemerintah dalam merespons organisasi Islam (Ismail et al., 2021).

Demonstrasi DPR Agustus 2025 merupakan salah satu peristiwa protes massa terbesar dalam sejarah kontemporer Indonesia. Data yang beredar dalam pemberitaan mencatat lebih dari 3.337 penangkapan, 1.042 korban luka-luka, dan 10 orang dinyatakan meninggal dunia (YLBHI & LBH, 2025, sebagaimana dikutip dalam NU Online, 4 September 2025). Skala kekerasan yang terjadi selama demonstrasi tersebut mendorong berbagai media untuk mengambil posisi naratif yang berbeda-beda dalam pemberitaannya. Dalam konteks ini, cara media mengonstruksi realitas peristiwa tersebut menjadi sangat penting untuk dipelajari, karena pemberitaan media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi secara aktif membentuk persepsi publik tentang siapa yang bersalah, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana konflik tersebut seharusnya diselesaikan (Entman, 1993).

Kajian mengenai framing media dalam konteks protes dan demonstrasi di Indonesia telah berkembang cukup pesat, terutama dalam satu dekade terakhir. Berbagai penelitian telah menganalisis framing konflik Papua (Widyaningsih & Lestari, 2020; Sonni et al., 2023), konflik Wamena (Paramitha & Suranto, 2022), konflik Rempang (Nabila & An'Amta, 2024), demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja (Achmad et al., 2022), serta isu-isu kekerasan aparat kepolisian seperti kasus Wadas (Romadlan & Fauziah, 2022) dan Kanjuruhan (Habibi et al., 2023). Namun, kajian yang secara khusus berfokus pada framing media digital berbasis organisasi Islam moderat, khususnya NU Online dalam peristiwa demonstrasi masif yang mempertaruhkan relasi negara-warga negara masih belum banyak dieksplorasi. Di sinilah letak gap penelitian ini.

Penelitian ini menganalisis framing NU Online dalam pemberitaan demonstrasi DPR Agustus 2025 menggunakan model analisis framing Robert N. Entman (1993) yang mencakup empat dimensi: (1) *define problems*, mendefinisikan masalah; (2) *diagnose causes*, mengidentifikasi penyebab; (3) *make moral judgments*, memberikan penilaian moral; dan (4) *treatment recommendation*, menawarkan solusi. Model Entman dipilih karena menyediakan kerangka analitik yang sistematis dan telah terbukti relevan untuk menganalisis framing media dalam berbagai konteks konflik sosial-politik (Lupien et al., 2022; Muhsin & Adikara, 2024).

Novelty penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini merupakan salah satu yang pertama menganalisis framing media digital berbasis organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam peristiwa demonstrasi masif. Kedua, penelitian ini memperkaya diskusi framing dengan mengintegrasikan perspektif komunikasi Islam, nonviolence, dan peacebuilding digital. Ketiga, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemahaman peran media Islam digital dalam ekosistem komunikasi demokrasi yang plural di Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pendekatan ini dipilih karena analisis framing pada dasarnya bertujuan untuk memahami proses konstruksi makna dalam teks media, yang mensyaratkan interpretasi mendalam terhadap pilihan bahasa, struktur narasi, dan konteks produksi teks (Neuman, 2014). Paradigma konstruktivis relevan digunakan karena berasumsi bahwa realitas sosial, termasuk peristiwa demonstrasi DPR Agustus 2025 tidak hadir secara given dalam teks media, melainkan dikonstruksi melalui praktik jurnalisme yang dipengaruhi oleh nilai, orientasi ideologis, dan posisi kelembagaan media yang bersangkutan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi teks berita NU Online terkait demonstrasi DPR Agustus 2025 yang dipublikasikan pada periode Agustus–September 2025. Pemilihan unit analisis menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) berita secara eksplisit berkaitan dengan demonstrasi DPR Agustus 2025; (2) diterbitkan oleh redaksi NU Online; dan (3) memuat elemen naratif yang cukup untuk dianalisis menggunakan keempat dimensi framing Entman. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 11 artikel berita NU Online sebagai korpus analisis, meliputi: (1) "*Prabowo Tuduh Aksi Massa dengan Makar, Ketua PBNU: Parpol Sudah Pragmatis, Semua Ikut Pemerintah*"; (2) "*Aksi 25-31 Agustus 2025: 3.337 Orang Ditangkap, 1.042 Luka-Luka, 10 Tewas Akibat Direpresi Aparat*"; (3) "*Ketua PBNU Sebut Wacana Darurat Militer Berlebihan*"; (4) "*Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pidato Prabowo Tak Singgung Ketidakadilan Sosial dan Kebrutalan Aparat*"; (5) "*Gusdurian Desak Kapolri Mundur usai Marak Kekerasan Aparat*"; (6) "*Prabowo Bilang Akan Evaluasi DPR dan Dukung Langkah Partai Nonaktifkan Anggota yang Picu Polemik*"; (7) "*Kebebasan Berpendapat Dilindungi tapi Jangan Anarkis*"; (8) "*Gusdurian Kecam Aksi Brutal Polisi: Demontran Bukan Kriminal*"; (9) "*PBNU Ajak Masyarakat Doakan dan Shalat Ghaib untuk Affan Kurniawan*"; (10) "*Masyarakat Sipil Nyatakan 'Darurat Kekerasan Negara', Desak Presiden hingga Kapolri Bertanggung Jawab*"; dan (11) "*Pergunu Serukan Pelajar Tidak Ikut Aksi Anarkis, Polisi Juga Tak Boleh Arogan Hadapi Massa*" (Alaykaula, 2025).

Analisis data dilakukan menggunakan model framing Robert N. Entman (1993) yang mencakup empat dimensi analitik: (1) Define Problems, yaitu identifikasi cara media mendefinisikan isu utama; (2) Diagnose Causes, yaitu identifikasi aktor atau kondisi yang ditetapkan sebagai penyebab masalah; (3) Make Moral Judgments, yaitu penilaian normatif yang dilekatkan pada aktor-aktor terlibat; dan (4) Treatment Recommendation, yaitu solusi atau tindakan yang disarankan sebagai respons atas masalah yang telah didefinisikan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan membaca setiap teks berita secara menyeluruh, mengidentifikasi pilihan diksi dan struktur naratif yang berkaitan dengan masing-masing dimensi, kemudian menginterpretasikannya dalam konteks posisi editorial dan kelembagaan NU Online.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan mencocokkan temuan framing dalam teks berita NU Online dengan literatur framing media Indonesia yang relevan dan konteks peristiwa demonstrasi secara lebih luas. Keabsahan interpretasi diperkuat melalui pembacaan berulang (*reading and re-reading*) terhadap teks-teks yang dianalisis dan konsistensi penggunaan kerangka Entman sebagai alat analitik tunggal.

## Hasil dan Pembahasan

Analisis framing terhadap pemberitaan NU Online mengenai demonstrasi DPR Agustus 2025 menghasilkan temuan yang terorganisasi berdasarkan empat dimensi model Robert N. Entman (1993). Temuan-temuan ini menggambarkan bagaimana NU Online mengonstruksi narasi peristiwa, menempatkan aktor-aktor yang terlibat, memberikan penilaian normatif, dan menawarkan arah penyelesaian dalam teks beritanya.

### 1. *Define Problems*: Demonstrasi DPR sebagai Isu Kekerasan Negara, Bukan Gangguan Keamanan

Dalam pemberitaan mengenai demonstrasi DPR Agustus 2025, NU Online membangun narasi bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pengendalian massa atau gangguan ketertiban publik. Fokus pemberitaan diarahkan pada dimensi represivitas negara melalui penonjolan jumlah korban, penangkapan massal, dan dampak kemanusiaan yang muncul selama aksi berlangsung. Data seperti "*3.337 ditangkap, 1.042 luka-luka, dan 10 tewas*" berfungsi bukan sekadar sebagai informasi statistik, melainkan sebagai perangkat legitimasi untuk menunjukkan bahwa kekerasan negara menjadi inti persoalan. Dalam studi mengenai protes politik, angka korban dan penangkapan kerap dipakai media untuk memperkuat definisi situasi sekaligus membentuk persepsi publik mengenai siapa pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban (Chenoweth, 2023; Canevez & Winter, 2022).

Penempatan fokus pemberitaan pada kekerasan negara juga menunjukkan adanya pilihan framing yang tidak selalu sejalan dengan framing berbasis ketertiban umum yang lazim digunakan media pro-pemerintah. Framing berbasis kekerasan negara dapat meningkatkan perhatian publik terhadap pelanggaran hak sipil, tetapi di sisi lain dapat menggeser perhatian dari agenda substantif gerakan sosial itu sendiri. Dalam hal ini, data numerik, deskripsi korban, dan bahasa kemanusiaan dapat dimanfaatkan secara berbeda oleh berbagai aktor untuk mendukung narasi yang saling berlawanan. Studi framing protes indigenous di Amerika Latin menunjukkan bahwa pemilihan frame berbasis kekerasan negara secara konsisten mendorong pembaca untuk mempersoalkan legitimasi respons aparat dibandingkan legitimasi protes itu sendiri (Lupien et al., 2022). Karena itu, analisis framing terhadap NU Online perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya bias seleksi isu dan bias penonjolan makna dalam penyajian fakta, terutama ketika angka korban menjadi pusat legitimasi naratif (Canevez & Winter, 2022; Chenoweth, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pembacaan terhadap framing kekerasan negara juga dapat diperkaya dengan perspektif nonviolence dan komunikasi digital. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa narasi damai tidak hanya dibangun melalui ruang institusional, tetapi juga diproduksi melalui media sosial dan inisiatif masyarakat sipil berbasis pluralisme religius,

seperti yang terlihat dalam kampanye digital komunitas *@toleransi.id* (Pamungkas et al., 2024). Akan tetapi, medium digital memiliki sifat ambivalen: ia dapat memperluas praktik perdamaian sekaligus memobilisasi emosi publik dan mempercepat polarisasi. Oleh sebab itu, memahami framing demonstrasi DPR tidak cukup hanya melalui teks media, tetapi juga perlu melihat bagaimana narasi tersebut berinteraksi dengan ekosistem komunikasi digital yang lebih luas (Branagan, 2022; Aduda & Bolf, 2024).

## 2. *Diagnose Causes*: Aparat sebagai Penyebab Utama dalam Framing NU Online

Dalam model framing Entman, *diagnose causes* merujuk pada cara media mengidentifikasi sumber persoalan sekaligus menentukan siapa aktor yang dianggap bertanggung jawab atas munculnya suatu isu. Sejumlah penelitian framing, misalnya Ismail et al. (2021) dalam analisis pemberitaan pembubaran FPI dan Muhsin & Adikara (2024) dalam kajian pemberitaan *klithih* di Harian Jogja menunjukkan bahwa pemilihan aktor penyebab sangat dipengaruhi oleh sudut pandang media, orientasi ideologis, serta kepentingan naratif yang hendak dibangun dalam teks berita. Dalam konteks pemberitaan demonstrasi DPR Agustus 2025, pola ini tampak ketika bahasa pemberitaan lebih banyak menyoroti tindakan aparat dibanding tindakan massa, sehingga penyebab utama konflik diletakkan pada respons keamanan negara, bukan pada demonstrasi itu sendiri.

NU Online mengonstruksi penyebab konflik melalui pilihan bahasa yang bersifat agentif, seperti "direpresi aparat", "aksi brutal polisi", atau "kekerasan aparat". Diksi semacam ini bekerja bukan sekadar sebagai penjelas peristiwa, melainkan sebagai penanda siapa yang dianggap memicu eskalasi. Dalam perspektif framing, bahasa yang secara eksplisit melekatkan tindakan represif kepada institusi negara akan mengarahkan pembaca untuk melihat aparat keamanan sebagai pusat penyebab masalah. Temuan serupa terlihat dalam penelitian Romadlan dan Fauziah (2022) mengenai konstruksi kekerasan aparat di Desa Wadas, yang menemukan bahwa media online cenderung menggunakan diksi bermuatan kritis untuk menekankan peran aktif polisi dalam eskalasi konflik. Widyaningsih dan Lestari (2020) dalam studi framing kerusuhan Papua juga menemukan pola serupa, di mana pilihan diksi media menentukan siapa yang dibingkai sebagai pelaku dan siapa yang dibingkai sebagai korban.

Meski demikian, framing penyebab konflik tidak selalu bersifat tunggal. Paramitha dan Suranto (2022) dalam studi framing konflik Wamena menemukan bahwa media yang berbeda dapat menempatkan penyebab konflik pada faktor yang berlainan, bergantung pada orientasi kelembagaan dan agenda editorialnya. Hutahaen dan Lase (2021) juga menemukan dalam studi konflik Nduga bahwa framing penyebab dapat bersifat plural dan berubah mengikuti posisi media terhadap isu yang diberitakan. Dalam kasus demonstrasi DPR, kemungkinan adanya konteks provokasi, dinamika massa, atau interaksi antarkelompok menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan ketika membaca narasi penyebab secara lebih komprehensif.

Studi lintas konteks menunjukkan bahwa framing berbasis aparat sebagai penyebab juga kerap muncul dalam situasi regresi demokratis. Penelitian Siregar et al. (2022) mengenai demokratisasi dan kapasitas kepolisian di Indonesia menemukan bahwa ruang kritis terhadap institusi kepolisian justru cenderung melebar ketika terjadi pelemahan mekanisme pengawasan demokratis. Dalam kondisi semacam ini, media yang memiliki afiliasi dengan

organisasi sipil seperti NU Online, berpotensi mengisi peran pengawasan yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga negara. Karena itu, penetapan aparat sebagai penyebab utama dalam framing NU Online perlu dibaca tidak hanya sebagai pilihan naratif, tetapi juga sebagai praktik akuntabilitas media dalam konteks demokrasi yang sedang diuji.

### **3. *Make Moral Judgment*: Negara Diposisikan Bersalah secara Etis dalam Framing NU Online**

Dalam dimensi *make moral judgment*, media tidak berhenti pada penjelasan mengenai apa yang terjadi atau siapa penyebab konflik, tetapi bergerak lebih jauh dengan memberikan penilaian normatif terhadap tindakan para aktor yang terlibat. Dalam pemberitaan demonstrasi DPR Agustus 2025, NU Online membangun penilaian moral yang cukup tegas dengan menempatkan tindakan aparat sebagai bentuk kekerasan yang melampaui batas kepatutan demokratis. Pilihan diksi seperti "direpresi aparat", "aksi brutal polisi", dan "kekerasan aparat" bukan sekadar pilihan bahasa jurnalistik, melainkan perangkat moral yang menandai negara sebagai aktor yang gagal menjalankan prinsip perlindungan warga negara (Yusuf et al., 2024; Widyarningsih & Lestari, 2020; Hutahaen & Lase, 2021).

Penilaian moral tersebut diperkuat melalui narasi yang menempatkan demonstran sebagai warga negara yang memiliki legitimasi etik untuk menyampaikan aspirasi politik. Frasa "demonstran bukan kriminal" memiliki fungsi yang lebih dalam daripada sekadar pembelaan terhadap peserta aksi; ia menjadi batas moral yang memisahkan hak demokratis dari upaya kriminalisasi warga. Pola framing semacam ini sejalan dengan temuan Achmad et al. (2022) dalam analisis pemberitaan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja, yang menunjukkan bahwa media kritis membangun legitimasi demonstran melalui penegasan hak-hak konstitusional dan penolakan terhadap labeling kriminal. Triyono dan Setyawan (2021) dalam studi framing pemberitaan konflik agama di Aceh juga menemukan bahwa penggunaan bingkai moral secara konsisten berkorelasi dengan positioning editorial media terhadap aktor yang dinilai bertanggung jawab.

Dimensi moral dalam pemberitaan NU Online juga diperluas melalui pelibatan aktor-aktor masyarakat sipil seperti PBNU, Gusdurian, KontraS, dan koalisi advokasi hak asasi manusia. Kehadiran kelompok-kelompok ini membentuk fondasi etik yang menghubungkan isu demonstrasi dengan nilai demokrasi, keadilan, dan perlindungan warga negara. Berbagai studi framing menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil sering berfungsi sebagai penyeimbang terhadap narasi resmi negara dengan menghadirkan sudut pandang berbasis hak asasi dalam ruang publik (Hutahaen & Lase, 2021; Sonni et al., 2023). Penelitian Gelgel (2020) mengenai jurnalisme damai dalam isu-isu Islam radikal di Bali juga menegaskan bahwa media yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan perdamaian dalam pemberitaannya cenderung membangun bingkai moral yang lebih nuansif dibanding media yang semata-mata berorientasi pada nilai berita.

Meskipun demikian, klaim bahwa negara bersalah secara etik perlu dibaca sebagai hasil konstruksi framing yang dipengaruhi oleh konteks media dan orientasi kelembagaan pemberitaan. Riauan et al. (2020) dalam studi framing "*Aksi Bela Islam*" di Riau Pos menemukan bahwa media berbasis keagamaan cenderung membangun bingkai moral yang selaras dengan nilai dan kepentingan komunitas keagamaan yang menjadi basis audiensnya. Karena itu, *make*

moral judgment dalam NU Online perlu dipahami bukan sebagai refleksi objektif atas realitas, tetapi sebagai hasil seleksi nilai yang dipengaruhi oleh posisi media sebagai representasi komunitas Islam moderat dalam lanskap demokrasi Indonesia.

#### **4. *Treatment Recommendation*: Akuntabilitas Negara sebagai Solusi dalam Framing NU Online**

Dalam dimensi *treatment recommendation*, media tidak hanya mendefinisikan masalah dan menilai aktor yang terlibat, tetapi juga menawarkan arah penyelesaian yang dianggap paling layak secara normatif dan politik. Dalam pemberitaan demonstrasi DPR Agustus 2025, NU Online membangun rekomendasi yang berpusat pada akuntabilitas negara, bukan pada penguatan pendekatan keamanan. Desakan agar Presiden dan Kapolri mengambil tanggung jawab politik, tuntutan pengunduran diri Kapolri, pengakuan negara terhadap korban, serta penghentian kekerasan aparat memperlihatkan adanya pergeseran naratif dari logika pengendalian massa menuju reformasi institusional (Yusuf et al., 2024; Hutahaen & Lase, 2021; Sonni et al., 2023).

Konstruksi solusi berbasis akuntabilitas tersebut sejalan dengan berbagai kajian tentang legitimasi institusi kepolisian dan implikasinya bagi demokrasi. Siregar et al. (2022) menemukan bahwa regresi demokratis di Indonesia antara lain ditandai oleh lemahnya mekanisme akuntabilitas kepolisian, sehingga krisis kepercayaan publik terhadap aparat tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan humas, melainkan membutuhkan reformasi struktural yang sesungguhnya. Nurhakki et al. (2023) dalam studi krisis komunikasi polisi pasca kasus Brigadir Josua juga menunjukkan bahwa upaya pemulihan reputasi institusi kepolisian yang tidak disertai dengan akuntabilitas substansial justru memperdalam distrust publik. Dengan demikian, rekomendasi NU Online untuk menuntut pertanggungjawaban institusional bukan sekadar posisi moral, melainkan respons terhadap persoalan struktural dalam tata kelola kepolisian Indonesia.

Peran organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi hak asasi manusia turut memperkuat framing bahwa akuntabilitas negara merupakan jalan keluar yang lebih demokratis dibanding respons represif. Kehadiran PBNU, Gusdurian, KontraS, dan koalisi masyarakat sipil memperluas makna solusi dari sekadar penegakan hukum menuju perlindungan hak-hak demonstran dan koreksi terhadap praktik kekuasaan negara. Studi Belgioioso et al. (2020) mengenai peran pasukan perdamaian dan perlindungan sipil menemukan bahwa keberadaan aktor-aktor mediasi non-negara dalam konflik protes secara konsisten berkontribusi pada de-eskalasi dan pengurangan kekerasan. Canevez dan Winter (2022) dalam studi mengenai tim perdamaian dalam nexus protes-represi juga menemukan bahwa pendekatan de-eskalatoris yang melibatkan aktor sipil lebih efektif dalam mencegah spiral kekerasan dibandingkan respons keamanan konvensional. Temuan-temuan ini memperkuat relevansi rekomendasi NU Online yang menempatkan aktor sipil dan mekanisme akuntabilitas publik sebagai fondasi penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa NU Online mengonstruksi pemberitaan demonstrasi DPR Agustus 2025 melalui framing yang secara konsisten menempatkan negara, bukan massa demonstran sebagai pihak yang bermasalah. Keempat dimensi framing Entman yang dianalisis menghasilkan gambaran yang koheren: NU Online mendefinisikan peristiwa tersebut sebagai krisis kekerasan negara, menempatkan aparat sebagai penyebab utama konflik, menilai tindakan negara sebagai pelanggaran etis terhadap hak-hak sipil, dan menawarkan akuntabilitas institusional sebagai satu-satunya solusi yang sah secara demokratis.

Pola framing yang terbentuk mencerminkan orientasi editorial NU Online yang berpijak pada nilai-nilai Islam moderat, khususnya prinsip keadilan (*adl*) dan kepentingan umum (*maslahah*), sekaligus menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak sipil dalam konteks demokrasi Indonesia. Dalam posisi ini, NU Online tidak berfungsi semata sebagai media dakwah, melainkan juga sebagai arena pembentukan opini publik dalam isu-isu kenegaraan yang mempertaruhkan relasi antara warga negara dan kekuasaan. Temuan ini bersesuaian dengan kecenderungan yang teridentifikasi dalam studi Syahputra (2020) mengenai peran media sosial dalam gerakan berbasis Islam, di mana media keagamaan mengintegrasikan nilai normatif Islam dengan tuntutan-tuntutan demokratis dalam satu bingkai naratif yang kohesif. Temuan ini juga memperkaya diskusi akademik mengenai peran media Islam digital dalam ekosistem informasi dan demokrasi Indonesia kontemporer. Di tengah polarisasi media yang semakin menguat dan regresi demokratis yang diidentifikasi oleh sejumlah peneliti (Siregar et al., 2022), posisi NU Online sebagai media berbasis organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memberikannya modal sosial dan legitimasi moral yang khas untuk membangun narasi publik yang berbeda dari media arus utama maupun media partisan.

## Rekomendasi dan Implikasi

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam agenda penelitian selanjutnya. Pertama, analisis hanya berfokus pada NU Online sebagai satu platform, sehingga perbandingan dengan media Islam lain, seperti *Republika*, *Islami.co*, atau media berbasis Muhammadiyah belum dapat dilakukan. Studi komparatif framing lintas media Islam digital akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keragaman konstruksi narasi dalam ekosistem media Islam Indonesia.

Kedua, penelitian ini tidak memasukkan analisis respons khalayak atau dampak framing terhadap persepsi publik, sehingga efek aktual dari konstruksi narasi NU Online belum dapat diukur. Penelitian lanjutan dapat menggabungkan analisis framing dengan survei persepsi publik atau analisis komentar pembaca untuk memetakan bagaimana narasi media diterima dan diinterpretasikan oleh khalayak. Ketiga, analisis mengenai keterlibatan aktor-aktor *nonviolence* dan *peacebuilding digital*, seperti yang telah ditunjukkan dalam studi Pamungkas et al. (2024) mengenai kampanye @toleransi.id dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana narasi damai diproduksi dan disebar dalam ekosistem komunikasi digital yang lebih luas.

Secara implikasi teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi model framing Entman untuk menganalisis media Islam digital dalam konteks peristiwa protes politik, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan kerangka analitik yang mengintegrasikan perspektif komunikasi Islam dengan teori framing dan studi media kritis. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi referensi bagi pengelola media berbasis organisasi keagamaan dalam merumuskan kebijakan editorial yang menyeimbangkan nilai-nilai normatif dengan standar jurnalisme yang bertanggung jawab dan memperhatikan dimensi peacebuilding dalam pelaporan konflik (Gelgel, 2020; Sonni et al., 2023).

## Referensi

- Achmad, R. F., Febrianita, R., Permatasari, M. S., & Wong, C. D. F. (2022). Refleksi demokrasi di Indonesia: Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dalam media berita online. *Jcommsci - Journal of Media and Communication Science*, 5(1), 12–25. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v5i1.156>
- Alaykaula, M. (2025). Konstruksi isu makar pada demonstrasi DPR Agustus 2025 dalam pemberitaan NU Online sebagai media terafiliasi keagamaan (Skripsi). Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aduda, L., & Bolf, L. (2024). The conflict potential of sand: Illegal sand mining on the African continent. *Environment and Security*, 2(4), 548–567. <https://doi.org/10.1177/27538796241230583>
- Ahmad, J., & Fadillah, N. (2021). An analysis of the failures and successes of the presidential decree in the parliament dissolution: A comparative of the presidential decree in Tunisia and Indonesia during Soekarno and Abdurrahman Wahid. *Al-Risalah*, 21(2), 163–181. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i2.897>
- Belgioioso, M., Salvatore, J. D., & Pinckney, J. (2020). Tangled up in blue: The effect of UN peacekeeping on nonviolent protests in post-civil war countries. *International Studies Quarterly*, 65(1), 1–15. <https://doi.org/10.1093/isq/sqaa015>
- Branagan, M. (2022). Nonviolence and sustainability: An indivisible connection. *Sustainability*, 14(11), 6426. <https://doi.org/10.3390/sul4116426>
- Canevez, R., & Winter, J. S. (2022). Peace teams in the protest-repression nexus: A sociomaterial perspective of de-escalatory tactics. *Proceedings of HICSS 2022*. <https://doi.org/10.24251/hicss.2022.835>
- Chenoweth, E. (2023). The role of violence in nonviolent resistance. *Annual Review of Political Science*, 26(1), 55–77. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051421-124128>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fahlberg, A., Garcia, K. R., García, L., Perez, J. L. C., & Nadel, P. (2024). How the police and armed forces construct gender on social media: A comparison of El Salvador and Honduras. *Feminist Criminology*, 20(3), 211–240. <https://doi.org/10.1177/15570851241268187>
- Gelgel, N. M. R. A. (2020). Peace journalism in framing radical Islamic issues in Bali. *Addin*, 14(1), 51. <https://doi.org/10.21043/addin.v14i1.7177>

- Habibi, M., Handoko, D., Kurniawan, D., Rasman, R., & Anggriani, R. (2023). Tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan dalam bingkai media asing. *Perspektif Komunikasi Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 7(1), 43. <https://doi.org/10.24853/pk.7.1.43-64>
- Hutahaen, G. S., & Lase, F. J. (2021). Pembingkai berita konflik bersenjata Nduga di *TabloidJubi.com*. *Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 115–126. <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.2.115-126>
- Ismail, P., Prihantoro, E., & Ohorella, N. R. (2021). Analisis kebijakan dan komunikasi pemerintah dalam membubarkan Front Pembela Islam (FPI). *Wacana Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(2), 268–279. <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i2.1590>
- Lupien, P., Rincón, A., Lalama, A., & Chiriboga, G. (2022). Framing indigenous protest in the online public sphere: A comparative frame analysis. *New Media & Society*, 26(3), 1566–1584. <https://doi.org/10.1177/14614448221074705>
- Muhsin, U. A., & Adikara, G. J. (2024). Analisis framing pemberitaan klithih pada media lokal *Harian Jogja*. *Lektur*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/lektur.v7i1.21035>
- Nabila, M., & An'Amta, D. A. A. (2024). Konflik Rempang dalam bingkai media: Analisis framing media online *batamtimes.co* dan *batamnews.co*. *H-Js*, 3(4), 338–350. <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i4.345>
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Nurhakki, N., Hayana, H., & Waliyuddin, W. (2023). The communication crisis of restoring the reputation of Indonesian National Police post the murder of Brigadier Josua on online media. *Palakka Media and Islamic Communication*, 4(2), 146–163. <https://doi.org/10.30863/palakka.v4i2.5550>
- Pamungkas, M. D., Suleman, Z., & Santoso, A. D. (2024). On digital ethnography: Nonviolent campaign movement of the Instagram community @TOLERANSI.ID in realizing religious moderation. *Al-Qalam*, 30(1), 126. <https://doi.org/10.31969/alq.v30i1.1427>
- Paramitha, A., & Suranto, S. (2022). Konstruksi pemberitaan konflik Wamena di *Kompas.com* dan *ACTNews* periode September–Oktober 2019: Analisis framing Robert N. Entman. *Lektur*, 4(2). <https://doi.org/10.21831/lektur.v4i2.18523>
- Putra, V. P. (2022). Construction of news on the shooting of six FPI soldiers at *Tempo.co*. *Propaganda*, 2(1), 39–50. <https://doi.org/10.37010/prop.v2i1.526>
- Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis framing "Aksi Bela Islam" sebagai dakwah Islam di Riau Pos. *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(1), 35. <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i1.7666>
- Rizky, P. A., & Velingsia, J. (2024). Police image restoration: A case study of the stampede (crowd crisis) at Kanjuruhan Malang. *Politicos Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 4(1), 11–21. <https://doi.org/10.22225/politicos.4.1.2024.11-21>
- Romadlan, S., & Fauziah, I. (2022). Konstruksi realitas media online mengenai kekerasan aparat kepolisian di Desa Wadas, Jawa Tengah. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 26(1), 53–70. <https://doi.org/10.17933/jskm.2022.4954>
- Salim, I. H., & Suhandano, S. (2023). The reporting of Brigadier J murder on Indonesian police's official news media: Corpus-based discourse analysis. *Journal of Language Intelligence and Culture*, 5(1), 55–74. <https://doi.org/10.35719/jlic.v5i1.120>

- Satriawan, I., Elven, T. M. A., & Lailam, T. (2023). Internet shutdown in Indonesia: An appropriate response or a threat to human rights? *Sriwijaya Law Review*, 19–46. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss1.1018.ppl9-46>
- Siregar, S. N., Raffiudin, R., & Noor, F. (2022). Democratic regression in Indonesia: Police and low-capacity democracy in Jokowi's administration (2014–2020). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(2), 197. <https://doi.org/10.22146/jsp.72129>
- Sonni, A. F., Irwanto, I., & Malau, M. H. (2023). Peaceful journalism in reporting conflict in Papua on the news portals. *Etnosia Jurnal Etnografi Indonesia*, 8(1), 161–173. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v8i1.26980>
- Syahputra, I. (2020). Social media activities and the 212 movement: The Indonesian ulema council's perspective. *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, 58(2), 323–354. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.323-354>
- Tapscott, R. (2021). Violence, sovereignty, and the Uganda Police Force. In *Arbitrary states: Social control and modern authoritarianism in Museveni's Uganda* (pp. 73–97). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198856474.003.0004>
- Triyono, A., & Setyawan, A. J. (2021). Aceh dan konflik agama: Konstruksi pada Harian Republika. *Profetika Jurnal Studi Islam*, 22(1), 141–158. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14773>
- Widyaningsih, S. N., & Lestari, R. D. (2020). Framing of online media news about riots in Papua: Studies on [www.detik.com](http://www.detik.com) and [www.reuters.com](http://www.reuters.com) in 2019. *Jurnal Pekommas*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050109>
- Yusuf, M., Akbar, M., & Sonni, A. F. (2024). Analisis framing berita kerusuhan dan diskriminasi di Papua pada media daring TIRTO.ID. *Kaganga Komunika Journal of Communication Science*, 6(1), 150–167. <https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v6i1.3991>